

Menuju Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan : Analisis Kebijakan Manajemen Lalu Lintas di Kawasan Cibiru Kota Bandung

Naufal Arief Budiman¹

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi : naufalbudiman812@gmail.com

Keywords:

*public policy
 traffic management
 traffic congestion
 sustainable urban
 mobility
 Cibiru*

Abstract: *Traffic congestion is one of the major urban transportation problems that affects mobility efficiency, economic productivity, and environmental quality. This study aims to analyze the implementation of traffic management policies in the Cibiru area of Bandung City and to identify policy enhancement strategies to support sustainable urban mobility. The study employs a qualitative approach using a literature review method through the analysis of policy documents, regulations, government reports, and relevant academic literature. The findings indicate that traffic congestion in Cibiru is caused by high traffic volume, roadside activities, limited road capacity, and the dominance of private vehicle use. Although various traffic management policies have been implemented, their effectiveness continues to face several challenges. The study concludes that corridor-based traffic management, improvements in public transportation services, and stronger stakeholder coordination are essential measures to promote more efficient and sustainable urban mobility.*

Kata Kunci:

*kebijakan publik
 manajemen lalu
 lintas
 kemacetan
 mobilitas perkotaan
 berkelanjutan
 Cibiru*

Abstrak: *Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan transportasi perkotaan yang berdampak terhadap efisiensi mobilitas masyarakat, produktivitas ekonomi, dan kualitas lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan manajemen lalu lintas di Kawasan Cibiru Kota Bandung serta mengidentifikasi upaya penguatan kebijakan dalam mendukung mobilitas perkotaan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis berbagai dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemacetan di Kawasan Cibiru dipengaruhi oleh tingginya volume kendaraan, hambatan samping, keterbatasan kapasitas jalan, dan dominasi penggunaan kendaraan pribadi. Berbagai kebijakan manajemen lalu lintas telah diterapkan, namun efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan manajemen lalu lintas berbasis koridor, peningkatan kualitas transportasi umum, dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam mewujudkan mobilitas perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.*

Pendahuluan

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan tingginya penggunaan kendaraan bermotor. Fenomena ini banyak terjadi di kota-kota besar Indonesia, termasuk Kota Bandung yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa di wilayah Jawa Barat. Pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur jalan telah menyebabkan penurunan kinerja jaringan transportasi dan meningkatkan tingkat kemacetan di berbagai koridor utama kota. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penurunan efisiensi mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatnya konsumsi bahan bakar, biaya perjalanan, polusi udara, serta berkurangnya produktivitas ekonomi perkotaan Morlok (2005).

Salah satu kawasan yang mengalami permasalahan kemacetan cukup serius adalah Kecamatan Cibiru yang terletak di bagian timur Kota Bandung. Kawasan ini memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk Kota Bandung dari arah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, sekaligus menjadi koridor penghubung menuju kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat kegiatan ekonomi. Tingginya volume kendaraan yang melintasi koridor Jalan AH. Nasution dan Jalan Cibiru, ditambah dengan keberadaan hambatan samping seperti aktivitas perdagangan, parkir di badan jalan, serta aktivitas naik-turun penumpang, menyebabkan penurunan tingkat pelayanan jalan dan memicu kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan transportasi di Cibiru tidak hanya berkaitan dengan kapasitas jalan, tetapi juga menyangkut aspek pengelolaan lalu lintas dan tata kelola transportasi perkotaan. Dalam perspektif kebijakan publik, penanganan kemacetan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen lalu lintas yang mampu mengoptimalkan penggunaan ruang jalan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Dye (2017), kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan manajemen lalu lintas menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan upaya pengendalian kemacetan di kawasan perkotaan. Selain itu, konsep mobilitas

perkotaan berkelanjutan (*sustainable urban mobility*) menekankan pentingnya integrasi antara manajemen lalu lintas, transportasi umum, dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan Litman (2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan kemacetan lalu lintas dari aspek teknis transportasi seperti volume kendaraan, kapasitas jalan, tingkat pelayanan jalan, dan rekayasa lalu lintas. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis teknis transportasi dan belum banyak menelaah permasalahan kemacetan dari perspektif kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan manajemen lalu lintas pada kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik koridor strategis seperti Cibiru. Padahal, keberhasilan pengelolaan lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan yang diterapkan, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan pemerintah dalam mengendalikan berbagai sumber hambatan lalu lintas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai bagaimana kebijakan manajemen lalu lintas yang diterapkan di Kawasan Cibiru dalam mengatasi kemacetan serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung terwujudnya mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Kajian ini menjadi penting mengingat Cibiru merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki peran vital dalam sistem transportasi Kota Bandung bagian timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan manajemen lalu lintas di Kawasan Cibiru Kota Bandung, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan alternatif penguatan kebijakan guna mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (1) bagaimana implementasi kebijakan manajemen lalu lintas di Kawasan Cibiru Kota Bandung; (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut; dan (3) bagaimana alternatif penguatan kebijakan manajemen lalu lintas yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas perkotaan berkelanjutan.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang kebijakan transportasi dan tata kelola mobilitas perkotaan. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dan para pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan manajemen lalu lintas yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kawasan Cibiru.

Tinjauan Literatur

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk merespons dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai produk hukum atau keputusan formal pemerintah, tetapi juga sebagai serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Dye (2017), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk intervensi yang dianggap paling tepat dalam mengatasi suatu permasalahan publik.

Senada dengan hal tersebut, Anderson (2015) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks transportasi perkotaan, kebijakan publik berperan sebagai dasar bagi pemerintah untuk merumuskan berbagai strategi pengelolaan lalu lintas, penyediaan infrastruktur transportasi, serta pengaturan mobilitas masyarakat guna meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan kualitas pelayanan publik.

Kemacetan lalu lintas sebagai salah satu permasalahan publik memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan transportasi

sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menjembatani antara tujuan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai. Kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan apabila tidak diimplementasikan secara efektif.

Salah satu model implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik adalah model yang dikembangkan oleh Edwards III (1980). Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang jelas dan konsisten akan memudahkan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup ketersediaan personel, anggaran, fasilitas, dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi mengacu pada komitmen, sikap, dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi, pembagian tugas, serta prosedur operasional yang mendukung implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, model Edwards III digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan manajemen lalu lintas di Kawasan Cibiru Kota Bandung. Penggunaan model tersebut dinilai relevan karena mampu menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi di tingkat daerah.

Manajemen Lalu Lintas dan Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan

Manajemen lalu lintas merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan yang tersedia melalui pengaturan, pengawasan, dan pengendalian arus kendaraan. Tujuan utama manajemen lalu lintas adalah meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan efisiensi pergerakan kendaraan maupun pengguna jalan lainnya. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan (2023),

manajemen lalu lintas mencakup berbagai tindakan seperti pengaturan simpang, pengendalian parkir, rekayasa lalu lintas, pengaturan angkutan umum, dan penataan hambatan samping yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Dalam perkembangan konsep transportasi modern, manajemen lalu lintas tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas jalan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan mobilitas perkotaan berkelanjutan (*sustainable urban mobility*). Menurut Litman (2023), mobilitas perkotaan berkelanjutan merupakan pendekatan yang bertujuan menciptakan sistem transportasi yang mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan yang sama.

Konsep mobilitas berkelanjutan menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan transportasi, tata guna lahan, transportasi publik, dan pengelolaan lalu lintas untuk menciptakan sistem mobilitas yang efisien, aman, inklusif, dan ramah lingkungan. Dalam konteks Kawasan Cibiru, penerapan manajemen lalu lintas yang terintegrasi dengan penguatan layanan angkutan umum dan penataan aktivitas di sekitar koridor jalan menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kemacetan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan pendekatan yang beragam. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek teknis transportasi seperti volume kendaraan, kapasitas jalan, tingkat pelayanan jalan (*level of service*), serta rekayasa lalu lintas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas infrastruktur jalan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemacetan di kawasan perkotaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khisty & Lall (2005) menunjukkan bahwa peningkatan volume lalu lintas yang melampaui kapasitas jalan akan menyebabkan penurunan kinerja jaringan transportasi dan memicu kemacetan. Sementara itu, penelitian lain menegaskan bahwa keberadaan hambatan samping seperti aktivitas perdagangan, parkir di badan

jalan, serta aktivitas naik dan turun penumpang turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat pelayanan jalan di kawasan perkotaan.

Di Indonesia, berbagai penelitian mengenai kemacetan perkotaan juga cenderung menitikberatkan pada analisis teknis lalu lintas dan perencanaan transportasi. Kajian-kajian tersebut umumnya menghasilkan rekomendasi berupa pelebaran jalan, pembangunan infrastruktur baru, atau penerapan rekayasa lalu lintas sebagai solusi utama untuk mengurangi kemacetan. Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya memperhatikan aspek implementasi kebijakan dan tata kelola transportasi sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan lalu lintas.

Selain itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan transportasi lebih banyak dilakukan pada tingkat kota secara umum dan belum banyak mengkaji kawasan koridor strategis yang memiliki karakteristik khusus sebagai pintu masuk wilayah perkotaan. Padahal, kawasan seperti Cibiru memiliki kompleksitas permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan volume kendaraan, tetapi juga menyangkut koordinasi antarinstansi, pengelolaan aktivitas di sekitar jalan, serta integrasi dengan sistem transportasi publik.

Kebaruan Penelitian (Novelty)

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa sebagian besar studi mengenai kemacetan masih berfokus pada aspek teknis transportasi dan belum banyak membahas permasalahan tersebut dari perspektif kebijakan publik, khususnya pada tingkat implementasi kebijakan manajemen lalu lintas. Selain itu, penelitian yang mengaitkan manajemen lalu lintas dengan konsep mobilitas perkotaan berkelanjutan pada kawasan koridor strategis di Kota Bandung masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan manajemen lalu lintas di Kawasan Cibiru Kota Bandung menggunakan perspektif implementasi kebijakan Edwards III serta menghubungkannya dengan konsep mobilitas perkotaan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang

memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menawarkan arah penguatan kebijakan berbasis koridor sebagai strategi untuk mendukung mobilitas perkotaan yang lebih berkelanjutan.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
1	Edwards III (1980)	Implementing Public Policy	Faktor implementasi kebijakan	Implementasi dipengaruhi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi	Menjadi landasan analisis implementasi kebijakan manajemen lalu lintas
2	Litman (2023)	Sustainable Urban Mobility	Mobilitas perkotaan berkelanjutan	Transportasi berkelanjutan membutuhkan integrasi kebijakan dan pengelolaan mobilitas	Menjadi dasar konsep mobilitas berkelanjutan dalam penelitian
3	Khisty & Lall (2005)	Transportation Engineering: An Introduction	Manajemen dan kinerja lalu lintas	Kemacetan dipengaruhi volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan	Menjelaskan faktor teknis penyebab kemacetan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
4	Putra & Handayani (2022)	Analisis Kemacetan pada Koridor Jalan Perkotaan	Kinerja ruas jalan	Hambatan samping berpengaruh signifikan terhadap kemacetan	Relevan dengan kondisi Jalan AH. Nasution di Cibiru
5	Sari et al. (2023)	Implementasi Kebijakan Transportasi Perkotaan	Implementasi kebijakan transportasi daerah	Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting keberhasilan kebijakan	Mendukung analisis implementasi kebijakan lalu lintas
6	Nugraha & Prasetyo (2024)	Manajemen Lalu Lintas Berbasis Koridor	Strategi pengelolaan koridor transportasi	Pendekatan koridor mampu meningkatkan efisiensi pergerakan kendaraan	Menjadi referensi alternatif solusi penelitian
7	Rahman et al. (2024)	Sustainable Transport Policy in Urban Areas	Kebijakan transportasi berkelanjutan	Integrasi transportasi publik dapat mengurangi kemacetan perkotaan	Mendukung konsep mobilitas berkelanjutan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
8	Penelitian Saat Ini (2026)	Menuju Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan: Analisis Kebijakan Manajemen Lalu Lintas di Kawasan Cibiru Kota Bandung	Analisis implementasi kebijakan manajemen lalu lintas menggunakan model Edwards III	Mengidentifikasi faktor implementasi dan merumuskan penguatan kebijakan berbasis koridor	Memiliki fokus pada perspektif kebijakan publik dan mobilitas berkelanjutan di Kawasan Cibiru

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan manajemen lalu lintas di Kawasan Cibiru Kota Bandung melalui kajian berbagai dokumen, regulasi, hasil penelitian terdahulu, serta data sekunder yang relevan. Menurut Creswell & Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena sosial melalui interpretasi terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia.

Metode studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan transportasi, manajemen lalu lintas, implementasi kebijakan, serta mobilitas perkotaan berkelanjutan. Studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan kemacetan dan berbagai alternatif kebijakan yang telah diterapkan maupun direkomendasikan dalam penelitian sebelumnya Zed (2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder. Data diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transportasi dan lalu lintas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dokumen perencanaan transportasi daerah, laporan instansi pemerintah, data statistik transportasi, artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, buku akademik, serta berbagai publikasi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menelaah berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan manajemen lalu lintas dan permasalahan kemacetan perkotaan. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan pola yang muncul dalam berbagai dokumen yang telah dikumpulkan. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menghasilkan inferensi yang valid dan dapat direplikasi berdasarkan data tekstual yang tersedia. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi informasi, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan.

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri atas empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan manajemen lalu lintas yang berkaitan dengan penanganan kemacetan di Kawasan Cibiru Kota Bandung. Selain itu, konsep mobilitas perkotaan berkelanjutan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, regulasi, data

statistik, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan meminimalkan bias dalam proses interpretasi data.

Hasil Penelitian

Kondisi Kemacetan di Kawasan Cibiru Kota Bandung

Kawasan Cibiru merupakan salah satu koridor strategis di bagian timur Kota Bandung yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar kota menuju Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Posisi tersebut menyebabkan tingginya intensitas pergerakan kendaraan setiap hari, baik kendaraan pribadi, angkutan umum, kendaraan barang, maupun kendaraan antarkota.

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan transportasi dan laporan pemerintah daerah, kemacetan lalu lintas di Kawasan Cibiru umumnya terjadi pada koridor Jalan AH. Nasution dan ruas jalan yang terhubung dengan pusat aktivitas masyarakat. Kepadatan lalu lintas cenderung meningkat pada jam berangkat kerja, jam pulang kerja, dan akhir pekan. Tingginya volume kendaraan yang melintasi kawasan tersebut menyebabkan penurunan kecepatan perjalanan dan meningkatnya waktu tempuh pengguna jalan.

Selain tingginya volume kendaraan, kondisi kemacetan juga dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan di tepi jalan, keberadaan parkir kendaraan pada badan jalan, aktivitas naik dan turun penumpang, serta pergerakan kendaraan yang keluar masuk kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi.

Kebijakan Manajemen Lalu Lintas di Kawasan Cibiru

Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas dan transportasi perkotaan. Kebijakan tersebut mencakup pengaturan arus lalu lintas, pengelolaan simpang jalan, pemasangan rambu dan marka jalan, pengawasan parkir, serta peningkatan fasilitas transportasi umum.

Selain itu, terdapat berbagai regulasi nasional maupun daerah yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen lalu lintas, termasuk kebijakan yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengguna jalan, serta pengelolaan ruang jalan. Berbagai program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, mengurangi konflik pergerakan kendaraan, dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan di kawasan perkotaan.

Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan di Kawasan Cibiru

Hasil kajian menunjukkan bahwa kemacetan di Kawasan Cibiru dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Tingginya Volume Kendaraan

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat menyebabkan beban lalu lintas pada koridor Jalan AH. Nasution semakin tinggi. Kondisi ini mengakibatkan kapasitas jalan yang tersedia tidak mampu mengakomodasi seluruh pergerakan kendaraan secara optimal.

Hambatan Samping

Aktivitas perdagangan, parkir kendaraan di badan jalan, keberadaan pedagang di sekitar koridor jalan, serta aktivitas naik dan turun penumpang menjadi hambatan samping yang berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas.

Keterbatasan Infrastruktur Jalan

Kapasitas beberapa ruas jalan yang relatif terbatas menyebabkan terjadinya antrean kendaraan terutama pada jam-jam puncak. Kondisi tersebut diperparah oleh keberadaan persimpangan yang menjadi titik konflik lalu lintas.

Dominasi Penggunaan Kendaraan Pribadi

Kendaraan pribadi masih menjadi moda transportasi yang dominan digunakan masyarakat. Tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi menyebabkan peningkatan volume kendaraan pada koridor utama Kawasan Cibiru.

Upaya Penanganan Kemacetan yang Telah Dilakukan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kawasan Cibiru. Upaya tersebut meliputi pengaturan lalu lintas pada persimpangan, penertiban parkir

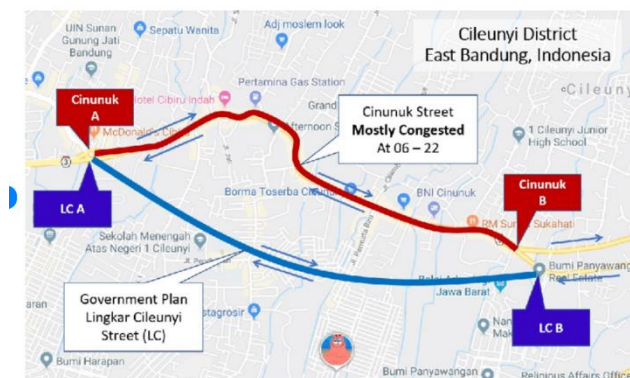
liar, pemasangan perlengkapan jalan, serta peningkatan pengawasan lalu lintas pada periode jam sibuk.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan pelayanan transportasi umum sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Berbagai program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kinerja sistem transportasi perkotaan.

Potensi Penguatan Manajemen Lalu Lintas Berbasis Koridor

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan manajemen lalu lintas berbasis koridor memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas di Kawasan Cibiru. Pendekatan ini menempatkan koridor jalan sebagai satu kesatuan sistem yang dikelola secara terintegrasi.

Beberapa aspek yang dapat dikembangkan melalui pendekatan tersebut meliputi penataan hambatan sampung, penguatan konektivitas angkutan umum, pengelolaan parkir, optimalisasi fungsi simpang, serta peningkatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan transportasi perkotaan.



Gambar 1. Kemacetan Bundaran Cibiru Hingga Cinunuk
 Sumber: ResearchGate

Tabel 1. Faktor Penyebab Kemacetan di Kawasan Cibiru

No.	Faktor	Deskripsi Temuan
1	Volume Kendaraan Tinggi	Tinggi nya arus kendaraan pada jam sibuk
2	Hambatan samping	Parkir di badan jalan, aktivitas perdagangan, dan naik turun penumpang
3	Kapasitas jalan terbatas	Ruas jalan tidak mampu menampung pertumbuhan kendaraan
4	Dominasi kendaraan pribadi	Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi
5	Aktivitas kawasan	Tingginya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan permukiman

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemacetan di Kawasan Cibiru Kota Bandung dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan operasional, yaitu tingginya volume kendaraan, keberadaan hambatan samping, keterbatasan kapasitas infrastruktur jalan, serta dominasi penggunaan kendaraan pribadi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan kemacetan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis transportasi, melainkan juga sebagai persoalan kebijakan publik yang memerlukan intervensi pemerintah secara terencana dan berkelanjutan.

Dalam perspektif kebijakan publik, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi kemacetan melalui berbagai kebijakan manajemen lalu lintas, seperti pengaturan arus kendaraan, penertiban parkir, pemasangan perlengkapan jalan, dan penguatan sistem transportasi umum. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Dye (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, berbagai kebijakan manajemen lalu lintas yang diterapkan di Kawasan Cibiru merupakan bentuk respons pemerintah terhadap permasalahan mobilitas perkotaan yang semakin kompleks.

Berdasarkan model implementasi kebijakan dari Edwards III (1980), efektivitas pelaksanaan kebijakan manajemen lalu lintas dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, berbagai kebijakan dan aturan lalu lintas telah disosialisasikan melalui rambu, marka jalan, dan berbagai bentuk informasi publik. Namun demikian, masih ditemukan perilaku pengguna jalan yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan lalu lintas, seperti parkir di badan jalan dan aktivitas berhenti pada area yang berpotensi mengganggu arus kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan masih menghadapi tantangan dalam mendorong perubahan perilaku pengguna jalan.

Dari aspek sumber daya, pengelolaan lalu lintas memerlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan berlangsung lebih cepat dibandingkan pengembangan kapasitas infrastruktur jalan. Situasi tersebut mengakibatkan tekanan yang semakin besar terhadap jaringan transportasi yang tersedia. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan manajemen lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya yang mendukung pelaksanaannya.

Aspek disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan juga memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi. Upaya penertiban parkir liar, pengawasan lalu lintas, dan pengaturan kendaraan pada jam sibuk menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mengurangi kemacetan. Namun, kompleksitas permasalahan transportasi perkotaan menuntut konsistensi pelaksanaan kebijakan serta koordinasi yang berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pengelolaan lalu lintas melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan berbeda, termasuk pemerintah daerah, dinas perhubungan, kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, koordinasi

antarlembaga menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang mampu mendukung koordinasi lintas sektor akan meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas dan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan transportasi di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan manajemen lalu lintas yang selama ini diterapkan masih cenderung berfokus pada pengaturan arus kendaraan dan penanganan kemacetan jangka pendek. Padahal, perkembangan konsep transportasi modern menekankan pentingnya pendekatan mobilitas perkotaan berkelanjutan (*sustainable urban mobility*). Menurut Litman (2023), mobilitas perkotaan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga memperhatikan efisiensi penggunaan energi, aksesibilitas masyarakat, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Kawasan Cibiru, upaya penanganan kemacetan perlu diintegrasikan dengan penguatan transportasi umum, pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, serta penataan aktivitas di sekitar koridor jalan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa kemacetan perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis berupa volume kendaraan dan kapasitas jalan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola transportasi serta efektivitas implementasi kebijakan. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menempatkan implementasi kebijakan sebagai fokus utama analisis. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai kemacetan perkotaan yang sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknis transportasi.

Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi bahwa penanganan kemacetan di Kawasan Cibiru memerlukan penguatan kebijakan manajemen lalu lintas berbasis koridor. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola koridor jalan secara lebih terintegrasi melalui pengendalian hambatan samping, pengelolaan parkir, optimalisasi simpang, peningkatan kualitas transportasi umum, serta penguatan

koordinasi antarlembaga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara maupun observasi lapangan. Kedua, penelitian berfokus pada Kawasan Cibiru sebagai studi kasus sehingga temuan yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda. Ketiga, ketersediaan data sekunder yang digunakan masih bergantung pada publikasi dan dokumen yang dapat diakses oleh peneliti.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, survei, maupun observasi lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan manajemen lalu lintas. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan analisis pada aspek evaluasi kebijakan, pemanfaatan teknologi transportasi cerdas (intelligent transportation systems), serta integrasi transportasi publik dalam mendukung mobilitas perkotaan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kemacetan di Kawasan Cibiru Kota Bandung merupakan permasalahan transportasi perkotaan yang dipengaruhi oleh tingginya volume kendaraan, keberadaan hambatan samping, keterbatasan kapasitas infrastruktur jalan, serta dominasi penggunaan kendaraan pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan manajemen lalu lintas untuk mengurangi tingkat kemacetan, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas dan kompleksitas aktivitas perkotaan pada koridor tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kemacetan tidak dapat hanya berfokus pada aspek teknis transportasi, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap implementasi kebijakan dan tata kelola transportasi perkotaan. Oleh karena itu, penguatan manajemen lalu lintas perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dengan mempertimbangkan pengendalian hambatan samping, pengelolaan parkir, optimalisasi fungsi simpang, peningkatan kualitas transportasi umum, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan perspektif administrasi publik dalam kajian kemacetan perkotaan melalui analisis implementasi kebijakan manajemen lalu lintas dan keterkaitannya dengan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa keberhasilan pengurangan kemacetan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam mengelola sistem transportasi perkotaan.

Sebagai implikasi praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan manajemen lalu lintas berbasis koridor di Kawasan Cibiru dengan mengintegrasikan pengelolaan lalu lintas, transportasi umum, dan penataan aktivitas kawasan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan di Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan, D. J. P. (2023). *Pedoman manajemen dan rekayasa lalu lintas*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Khisty, C. J., & Lall, B. K. (2005). *Transportation engineering: An introduction* (3rd ed.). Pearson Education.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Litman, T. (2023). *Evaluating transportation: Land use impacts*. Victoria Transport Policy Institute.
- Morlok, E. K. (2005). *Pengantar teknik dan perencanaan transportasi*. Erlangga.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.